

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi di Bank Indonesia, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan lembaga negara yang independen meresmikan KAKBI sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan *governance* melalui laporan keuangan yang didukung oleh pedoman akuntansi yang relevan.
- b. KAKBI merupakan bentukan komite independen yaitu Komite Penyusun KAKBI.
- c. KAKBI mengadopsi standar akuntansi keuangan umum dengan modifikasi untuk menyesuaikan dengan karakteristik unik Bank Indonesia sebagai bank sentral.
- d. Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) merupakan penyempurnaan dari PDP2LK (Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Penyajian Laporan Keuangan) Bank Indonesia sebelumnya. Pada saat masih menggunakan PDP2LK, menimbulkan sentimen pihak eksternal bahwa laporan keuangan Bank Indonesia hanya berpihak pada internal Bank Indonesia karena PDP2LK yang merupakan aturan yang dibuat oleh pihak internal Bank Indonesia tanpa ada pihak ketiga yang independen.
- e. Setelah adanya KAKBI, kemudian muncul independensi dari pihak ketiga yang mana merupakan pihak eksternal Bank Indonesia.
- f. Perubahan dari KAKBI terlihat pada penyajian laporan keuangan Bank Indonesia dimana sebelumnya Bank Indonesia menyajikan neraca, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, laporan arus

kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun setelah adanya KAKBI, Bank Indonesia hanya menyajikan neraca, laporan surplus defisit, dan catatan atas laporan keuangan.

- g. KAKBI bukan merupakan pedoman yang bersifat statis, dibutuhkan penyempurnaan dan pembelajaran mengenai KAKBI.

